DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

JURNAL

Oleh:

Nama : Tri Wahyu Winarso

Nomor Mahasiswa : 14313447

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

JURNAL

Abstract

Local revenue at the regional is input in the local economic development. The sectors are local Own-source Revenue, fiscal balance transfer from the Central Government to Regions, and the other local revenues, those are used by the government as capital to raise local economic development to be better.

This study was to analyse the efficiency of local revenue from a region/city in Bali Province. The indicators are local Own-source Revenue, fiscal balance transfer from the Central Government to Regions, and the other local revenues as input variabels to raise local economic development, that could be shown by local gross domestic product of a local government areas, human development indeks, and number of unpoor population as output variabels as local economic development indicators.

The result of this research was there are three regions in Bali Province in 2013 and 2014, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, and Kabupaten Gianyar were inefficient, whereas in 2015 there are five regions at inefficient, those are Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, and Kabupaten Klungkung could not fully efficient 100% to support the growing local economic development as output based on *Data Envelopment Analysis* (DEA) method.

Keyword : Local revenue at the regional, local economic development, inefficient, efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA)

Abstrak

Pendapatan daerah merupakan input dalam pembangunan ekonomi. Sektor tersebut yaitu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi sektor publik yaitu pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain-pendapatan yang sah sebagai variabel input dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi yang dilihat dari PDRB, IPM ,dan jumlah penduduk yang tidak miskin sebagai variabel output indikator pembangunan ekonomi daerah.

Hasil dari penelitian ini terdapat tiga daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013 dan 2014 yang mengalami inefisiensi yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar, sedangkan pada tahun 2015 terdapat lima daerah yang mengalami inefisiensi, bertambah dua daerah lain yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung yang tidak mencapai tingkat efisiensi relatif 100% selain tiga daerah yang sebelumnya telah mengalami inefisiensi dalam penggunaan input untuk menghasilkan output berdasarkan analisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Kata kunci : Pendapatan daerah, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi, Data Envelopment Analysis (DEA).

A. Pendahuluan

Di Indonesia pemerintah telah mendominasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dari proposional rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 80% pendapatan negara telah dihasilkan oleh mekanisme sektor publik (PPA UGM, 2000). Sumber daya yang dimiliki oleh daerah hendaknya dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai pelayanan sektor publik yang lebih baik, dan tepat sasaran untuk masyarakat, dengan kata lain bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sumber daya yang dihasilkan oleh daerah harus dapat dimanfaatkan secara efisien, mengingat bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah untuk pembangunan terus meningkat dan akan terus meningkat (Chusna, 2014).

Efisiensi merupakan kunci yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat dikelola atau dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dengan harapan dapat meningkatkan hasil yang baik dalam tahapan pembangunan suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah dapat tercapai jika hasil dari sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dalam pengalokasianya dengan langkah strategis guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang optimal. Ketika kondisi tersebut tercapai, maka pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia,2006).

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi otoritas yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelanggaraan pemerintahan daerah, kemudian fungsi pengelolaan pengeluaran pemerintah dari sumber dana pendapatan daerah yaitu sebagai distribusi anggaran harus dirahkan agar dapat menuntaskan masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan serta

problematika dalam proses pembangunan ekonomi daerah, serta dapat diarahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di daerah untuk menghasilkan output yang optimal *(BPS,2016)*.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Teori Efisiensi

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Efisiensi dalam manajemen perusahaan atau tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan demi kelangsungan perusahaan tersebut. Perusahaan dalam proses produksi dapat menggunakan satu input variabel ataupun lebih input variabel dalam menciptakan efisiensi. Guntur Riyanto (2009:21) memaparkan bahwa efisiensi sebuah perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis yang mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh output maksimal dari rangkaian input tertentu. Komponen lainnya yaitu efisiensi alokatif yang mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menggunakan input dalam proporsi optimal, mengingat adanya harga respektif dan teknologi produksi. Kedua ukuran tersebut selanjutnya digabungkan untuk memberikan sebuah ukuran total efisiensi ekonomi.

Dalam menganalisis suatu perekonomian hal yang perlu diutamakan adalah memusatkan perhatian pada konsep efisiensi alokatif atau efisiensi (kadang-kadang disebut efisiensi Pareto atau Optimalisasi Pareto). Suatu perekonomian adalah efisien apabila ia menyediakan bagi para konsumennya sekumpulan barang dan jasa yang paling diinginkan, dengan sumber daya-sumber daya dan teknologi tertentu dari perekonomian (Samuelson & Nordhaus, 2003).

Lebih lanjut lagi menurut pendapat Samuelson & Nordhaus (2003), efisiensi dapat terjadi apabila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi yang dapat membuat seseorang dalam keadaan lebih baik tanpa membuat seseorang yang lain dalam keadaan yang lebih buruk. Dalam kondisi-kondisi efisiensi alokatif, kepuasan atau utilitas satu orang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan utilitas seseorang yang lain.

Efisiensi pada layanan publik sangat diperlukan. Tujuan dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah sumber pendapatan daerah sebagai input yang dikelola untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik serta memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (Chusnal, 2014).

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006).

Menurut Rostow dalam Arsyad (2004), proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisonal *(the traditional society)*, prasyarat untuk tinggal landas *(the preconditions for take off)*, tinggal landas *(the take-off)*, menuju kedewasaan *(the drive to maturity)*, dan masa konsumsi tinggi *(the age of high mass-consumption)*. Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses usaha pemerintah daerah bersinergi bersama masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan dengan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Adisasmita, 2014).

3. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator makro ekonomi yang digunakan untuk megetahui tingkat atau kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah dengan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011).

Adisasmita (2014) mengungkapkan bahwa, alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2014), untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu. Tanpa memperhitungkan tekanan inflasi, PDRB selain dapat digunakan untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi, bermanfaat pula untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi

dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

A. Variabel input

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat untuk dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menjalankan pelaksanaan desentralisasi, yang bersumber dari APBN.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Padapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Variabel Output

1. Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan

Kondisi dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sehingga mengancam mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk konsumsi, kebutuhan untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

C. Penelitian Sebelumnya

Pengukuran kinerja dan efisiensi terhadap sektor publik sangat perlu dilakukan sebagai langkah untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja sektor publik dalam usaha meningkatkan pembangunan daerah. Berbagai penelitian sudah dilakukan dalam pengukuran tingkat efisiensi kinerja sektor publik sebagai berikut:

No	Penulis dan judul penelitian	Metode Analisis dan Hasil Penelitian
1.	Akhmad Syakir (2006), Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik (Studi Kasus Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2006).	Metode Free Disposable Hull (FDH), proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak merepresentasikan bahwa angka yang tinggi, demikian pula dalam perhitungan efisiensi dengan Public Sektor Efficiency dan Free Disposable Hull, Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran pemerintahan terhadap PDRB tidak terlalu relatif efisien, hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak terlalu relatif efisien, hal ini hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak berkorelasi dengan efisiensi dalam penggunaanya.
2.	Muttaqin F (2016), Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di DIY	Metode yang digunakan dalam analisis yaitu dengan metode alat analisis DEA, yang telah menghasilkan bahwa penelitian tersebut memaparkan bahwa pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di DIY memiliki tingkat efisiensi yang optimal yaitu 100% yang artinya bahwa variabel input PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, secara efektif dapat meningkatkan pertumuhan ekonomi yang dilihat dari variabel outputnya yaitu PDRB, penduduk tidak miskin, namun ada satu Kabupaten di DIY yaitu Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki tingkat ketidak efisienan dalam pengelolaan keuangan karena terjadi pemborosan penengeluaran pada alokasi dana PAD di Kulon Progo.

3.	Merini D. (2012), Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Kawasan Asia Tenggara	Menggunakan metode DEA, Penelitian ini mengulas tentang teknis efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor publik di Kawasan ASEAN, model optimalisasi yang digunakan adalah meminimalisasi input (input-oriented model) yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kualitas input dapat dikurangi untuk menghasilkan output yang optimal tanpa mengubah jumlah output. Dalam penelitian ini telah dihasilkan hasil dari analisis DEA yang bervariasi di kawasan Asia Tenggara, dimana Singapore mejadi negara yang tingkat efisiensinya secara rata-rata tertinggi di ketiga sektor, sementara Malaysia berdasarkan analisis mengalami inefisiensi paling parah, negara berpenghasilan menengah keatas cenderung memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi pada sektor publik sehingga tidak efisien adapun negara tersebut yaitu Mlaysia,Brunei Darussalam, dan Vietnam, sedangkan negara dengan kategori miskin seperti Cambodia dan Laos meskioun memiliki tingkat efisien yang relative tinggi tetapi dalam pelayanan publik merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang pelayanan publiknya-paling buruk baik di sektor kesehatan dan pendidikan. Tingkat efisiensi tinggi dikarenakan tingkat input yang rendah. Untuk negara yang memiliki derajat efisiensi di zona tengah seperti Indonesia dan Phillipines dapat meningkatkan derajat efisiensi dengan cara melakukan pengurangan input pada tingkat output yang tetap melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dan atau sebaliknya meningkatkan ouput pada tingkat input yang tetap. Adapun input yang dimaksud adalah variabel

		pengeluaran pemerintah seperti belanja pemerintah, pembiayaan pemerintah, dan investasi serta outputnya merupakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, industri, dll.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu alokasi pengeluaran sektor publik yang berasal dari input pendapatan suatu wilayah yang digunakan untuk sebuah pembangunan wilayah baik ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai output dengan metode FDH maupun DEA dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi di masing-masing wilayah berbeda, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan input di masing-masing wilayah begitupun dalam pengalokasiannya untuk menghasilkan output, dapat juga dilihat inefisiensi yang terjadi dengan menggunakan metode dalam penelitian-penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan metode DEA dalam mengihitung tingkat efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan pemerintah, dalam menghasilkan output pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, adapun variabel serta hasil akan di jelaskan pada berikutnya. Sehingga dengan metode tersebut dapat mengevaluasi untuk dapat mencapai efisiensi dalam sektor publik, berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi.

D. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, *Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan alat analisis yang digunakan untuk operasional secara matematika untuk mengukur tingkat efisiensi teknik suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang memiliki banyak input dan banyak output kemudian membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain.

Dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasikan unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan, yang merupakan keuntungan utama dalam aplikasi manajerial. Selain itu, DEA tidak memerlukan spesifikasi yang lebih lengkap dari bentuk fungsi yang menunjukkan hubungan produksi dan distribusi dari observasi. Teori DEA memiliki beberapa konsep nilai yang digunakan sebagai dasar proses manajerial yaitu (PAU UGM, 2000):

a. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap unit ekonomi yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial.
b. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai <100%. Disamping itu terdapat angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.
c. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit ekonomi efisiensi dengan input berbeda dan menghasilkan output yang berbeda dengan unit ekonomi lain.

Dalam penelitian ini, DEA digunakan disamping secara operasional kebijakan, dapat juga digunakan untuk merekomendasikan pembenahan bagi manajerial secara individu maupun secara kelompok yang kurang efisien untuk menjadi efisien.

Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap output dan input UKE. Bobot tersebut memiliki sifat:

1. Tidak bernilai negatif
2. Bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weight output/total weight input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input ≤ 1).

DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dapat diformulasiakan sebagai program linier fraksional, yang solusinya dapat diperoleh jika model tersebut ditransformasikan ke dalam program linier dengan bobot dari input dan output Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) tersebut sebagai variabel keputusan (decision variables).

DEA merupakan perhitungan efisiensi, teknik relatif. Hipotesis untuk hasil perhitungan DEA adalah:

a. UKE kurang efisien apabila efisiensi < 100%
b. UKE efisien apabila efisiensi = 100%

E. Hasil Penelitian

Pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menganalisis input dan output suatu daerah. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat efisiensi mulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode DEA telah diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 4.7

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen %)

Kabupaten/Kota	Tingkat Efisensi		
	2013	2014	2015
Jembrana	100	100	100
Tabanan	87.89	81.61	74.87
Badung	100	100	100
Gianyar	90.74	89.73	81.44
Klungkung	100	100	96.05
Bangli	100	100	100
Karangasem	89.33	88.45	82.40
Buleleng	100	100	95.83
Denpasar	100	100	100
Rata-rata	**96.44**	**95.53**	**92.28**

Sumber : BPS diolah

Tabel 4.7 telah menunjukkan hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan hasil tersebut pada tahun 2013 di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem menujukkan bahwa ketiga Kabupaten di Bali tersebut tidak effisien relatif 100%, adapun masing-masing tingkat efisiensi yang ditunjukkan yaitu pada Kabupaten Tabanan tingkat efisiensinya sebesar 87.89% , Kabupaten Gianyar 90.74%, kemudian Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 tingkat efisiensi pengelolaan keuangannya hanya sebesar 89.33% , sementara itu Kota Denpasar telah menunjukkan tingkat efisien relatif 100% dalam pengelolaan input daerah dan menghasilkan output daerah sesuai data yang diteliti tersebut. Pada tahun 2014

terlihat pada hasil olah data tersebut telah menunjukkan bahwa ketiga Kabupaten yaitu Tabanan, Gianyar dan Karangasem masih menunjukkan hasil yang kurang dari 100% efisien, adapun tingkat efisiensi pada tahun 2014 masing-masing daerah yaitu Kabupaten Tabanan sebesar 81.61%, Kabupaten Gianyar sebesar 89.73% dan Kabupaten Karangasem menunjukkan tingkat efiseinsi sebesar 88.45%.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah yaitu meliputi PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang telah digunakan untuk mencapai pembangunan ekonomi masing-masing daerah dalam usaha meningkatkan PDRB, IPM, dan usaha dalam mengurangi kemiskinan sebagai output dari pembangunan ekonomi, telah ditunjukkan pada hasil tabel 4.7 pada tahun 2015 ketiga daerah yaitu Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Karangasem masih menujukkan hasil yang belum efisien 100%, ketiga daerah tersebut relative menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun dari tahun ke tahun 2013-2015, sejalan hal tersebut pada tahun 2015 berdasarkan hasil olah data juga bertambah dua daerah yang menunjukkan tingkat efisiensi kurang dari 100% yaitu pada daerah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, adapun masing-masing daerah tersebut dengan tingkat efisiensinya pada tahun 2015, Kabupaten Tabanan 74.87% yang tahun sebelumnya yaitu sebesar 81.61% tingkat efisiensinya, kemudian Kabupaten Gianyar sebesar 81.44%, Kabupaten Klungkung 96.05%, Kabupaten Karangasem 82.40% , dan Kabupaten Buleleng 95.83%.

Secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan dana sektor publik Provinsi Bali dari tahun 2013 huingga tahun 2015 telah mengalami penurunan tingkat efisiensinya dalam mencapai pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.7 di atas.

Kemudian sejalan dengan terdapatnya inefisiensi pada sebagian daerah di Provinsi Bali menurut data penelitian ini telah ditunjukkan beberapa pengelolaan keuangan yang tidak efisien, berdasarkan perhitungan dengan metode DEA telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan keuangan daerah atau dengan kata lain terdapat pengalokasian keuangan untuk pembangunan ekonomi guna untuk

meningkatkan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan yang kurang tepat, berdasarkan data-data penelitian ini yang telah diolah sebagai berikut (tabel 4.8) :

Tabel 4.8
Penggunaan Input yang Efisien pada Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota	Penggunaan Input yang Efisien			Pemborosan		
		PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
2013	Tabanan	160,662,140	641,673,901	173,955,568	22,136,973	88,413,596	23,968,619
2013	Gianyar	216,468,369	579,712,843	172,286,276	22,090,556	59,159,587	17,581,782
2013	Karangasem	125,947,464	574,248,202	155,849,627	15,043,764	68,590,936	18,615,421
2014	Tabanan	173,773,480	651,778,673	203,503,050	39,158,121	146,871,827	45,857,384
2014	Gianyar	280,101,571	613,915,377	171,858,877	32,058,878	70,265,362	19,670,017
2014	Karangasem	141,527,397	620,856,451	225,046,492	18,480,966	81,072,832	29,387,077
2015	Tabanan	182,528,536	80,244,127	267,266,280	61,265,422	26,933,818	89,707,514
2015	Gianyar	301,881,277	59,541,676	246,492,522	68,798,091	13,569,419	56,175,113
2015	Klungkung	86,025,694	37,878,654	184,483,820	3,537,756	1,557,737	7,586,789
2015	Karangasem	169,145,275	41,904,546	242,830,626	36,128,117	8,950,486	51,866,736
2015	Buleleng	212,649,645	95,764,644	450,206,502	9,253,355	4,167,156	19,590,536

Sumber: BPS diolah

Keterangan : -PAD : Pendapatan Asli Daerah

-DP : Dana Perimbangan

-LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan analisis per unit (tabel 4.8), telah menunjukkan seberapa besar dana yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100% dan dalam hasil tersebut juga telah menunjukkan seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut, pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pemborosan yang terjadi berdasarkan data yang sudah diolah yaitu terdapat pada Kabupaten Tabanan terutama pada penggunaan dana perimbangan dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 Kabupaten Tabanan menjadi daerah yang paling rendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 87,89%, maka berdasarkan analisis DEA telah memberikan solusi bahwa Kabupaten Tabanan harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 22,136,973, kemudian harus mengurangi

dana perimbangan sebesar Rp 88,413,596 serta sebaiknya mengurangi penggunaan dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 23,968,619 dalam meningkatkan PDRB, IPM, dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Selanjutnya pada tahun 2014 Kabupaten Tabanan tetap menjadi daerah yang paling tidak efisien yaitu hanya mencapai tingkat efisiensi sebesar 81,61 %, agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka Kabupaten Tabanan dianjurkan untuk megurangi dana PAD sebesar Rp 39,158,121 mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp 146,871,827 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 45,857,384. Kemudian pada tahun 2015 Kabupaten Tabanan tetap menjadi daerah yang paling rendah capaian tingkat efisiensinya, dan bertambah daerah yaitu Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Kemudian dalam analisis penelitian ini menampilkan *efficient reference set*, yaitu untuk mencapai efisiensi 100% pada daerah yang tidak efisien dapat mengacu pada daerah-daerah yang menjadi *efficient reference set* sesuai dengan daerah yang bersangkutan dan pada periode waktu yang diteliti, berikut adalah tabel yang menunjukkan *efficient reference set*.

Tabel 4.9
***Multiplier*, Efisiensi dan *Efficient Reference Set* dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2013-2015**

Tahun	Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	Efficient Reference	Multiplier
2013	Tabanan	87.89	Klungkung	0.404
			Bangli	0.197
			Buleleng	0.223
			Denpasar	0.203
2013	Karangasem	89.33	Jembrana	0.348
			Bangli	0.207
			Buleleng	0.221
			Denpasar	0.136
2013	Gianyar	90.74	Jembrana	0.645
			Buleleng	0.024
			Denpasar	0.347
2014	Tabanan	81.61	Jembrana	0.714
			Buleleng	0.147

			Denpasar	0.166
2014	Karangasem	88.45	Jembrana	0.560
			Buleleng	0.253
			Denpasar	0.099
2014	Gianyar	89.73	Jembrana	0.653
			Badung	0.011
			Denpasar	0.350
2015	Tabanan	74.87	Jembrana	1.119
			Denpasar	0.148
2015	Gianyar	81.44	Jembrana	0.379
			Bangli	0.276
			Denpasar	0.369
2015	Karangasem	82.40	Jembrana	1.006
			Denpasar	0.141
2015	Buleleng	95.83	Jembrana	2.189
			Denpasar	0.078
2015	Klungkung	96.05	Jembrana	0.502
			Bangli	0.513

Sumber : BPS diolah

Menurut analisis DEA untuk mencapai efisien relatif 100%, maka masing-masing daerah sebaiknya merujuk pada daerah yang telah ditampilkan berdasarkan analisis ini.Untuk Kabupaten Tabanan yang tingkat efisiensinya hanya mencapai 87,89% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Denpasar dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,404, 0,197, 0,223 dan 0,203 pada tahun 2013, kemudian untuk tahun 2014 pengeloaan keuangan tersebut agar efisien Kabupaten Tabanan dapat merujuk pada daerah Jembrana, 0,714, Buleleng sebesar 0,147dan Denpasar 0,166. Kemudian pada tahun 2015 Tabanan merujuk pada daerah Jembrana 1,119 dan merujuk Denpasar dengan nilai *multiplier* 0,148. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar

untuk menyesuaikan input dan output Kabupaten Tabanan agar mencapai efisien relatif 100% begitupun untuk daerah-daerah lainya yang belum mencapai efisien relatif 100% dapat mencapai efisien dengan merujuk daerah lain berdasarkan multipliernya yang telah ditampilkan berdasarkan analisis DEA.

Pada Kabupaten Karangasem yang belum mencapai efisien relatif 100%, maka pada tahun 2013 dapat merujuk pada Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,348, Bangli sebesar 0,207, Buleleng sebesar 0,221 dan Denpasar 0,136, di tahun 2014 Kabupaten Karangasem dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,56, Buleleng sebesar 0,253 dan Denpasar sebesar 0,99. Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Karangasem untuk mencapai efisien ralatif sebesar 100% maka dapat mengacu pada Kabupaten Jembrana sebesar 1,006 dan Kota Denpasar sebesar 0,141. Selanjutnya untuk Kabupaten Gianyar yang belum mencapai efisien relatif 100%, maka pada tahun 2013 dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 0,645, Buleleng sebesar 0,24 dan Kota Denpasar sebesar 0,347, pada tahun 2014 Kabupaten Gianyar dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan kekurangan sebesar 0,653, Buleleng sebesar 0,11 dan Kota Denpasar sebesar 0,35. Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Gianyar untuk mencapai efisien ralatif sebesar 100% maka dapat mengacu pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* sebesar 0,379, Bangli 0,276 dan Kota Denpasar sebesar 0,369.

Kemudian pada tahun 2015 telah bertambah jumlah daerah yang tidak mencapai efisien sempurna yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung, pada kedua daerah tersebut untuk mencapai efisien relatif 100% dapat merujuk

daerah lain, menurut hasil analisis DEA menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng disarankan dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* 2,189 dan dapat merujuk pada Kota Denpasar sebesar 0,78 serta pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 agar mencapai 100% efisien dapat merujuk pada Kabupaten Jembrana dengan nilai *multiplier* sebesar 0,502 dan dapat merujuk pada Kabupaten Bangli dengan nilai *multiplier* sebesar 0,513.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi sektor publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2013 hingga 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel input yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dalam peningkatan PDRB, peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan sebagai ukuran tingkat capaian kesejahteraan masyarakat dalam menikmati adanya pembangunan ekonomi. Pada Provinsi Bali antara lain yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah mencapai efisiensi 100% sedangkan pada Kabupaten Tabanan, Kabupten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing hanya mencapai 87,89%, 90,74%, dan 89,33% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 ketiga daerah tersebut dengan tingkat efisiensi masing-masing hanya sebesar 81,61%, 89,73%, dan 88,45%. Kemudian pada tahun 2015 berdasarkan analisis DEA telah bertambah jumlah daerah yang mengalami inefisiensi. Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem tetap mengalami inefisiensi dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami tingkat efisiensi yang semakin menurun, sedangkan dua daerah yang bertambah mengalami inefisiensi pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Klungkung

dan Kabupaten Buleleng dengan masing-masing tingkat efisiensi 96,05% dan 95,83%.

2. Inefisiensi terjadi karena adanya indikasi bahwa daerah yang mengalami inefisiensi dikarenakan adanya pemborosan dalam penggunaan variabel input. Untuk mengatasi inefisiensi yang menyebabkan pemborosan penggunaan variabel input maka dalam hasil analisis DEA telah ditunjukkan cara mengatasi inefisiensi dengan mengurangi penggunaan input berdasrkan hasil anlisis DEA. Kemudian untuk daerah yang mengalami inefisiensi agar mencapai tingkat efisiensi 100% dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100% berdasarkan nilai *multiplier* yang telah ditunjukkan dalam analisis DEA.

G. Implikasi

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang telah mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan dapat mempertahankan demi kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan agar mampu menekan penggunaan inputnya dan mengimbangi outputnya. Jika dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masing-masing daerah tersebut, faktor lain yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, faktor-faktor sosial, birokasi, politik, dan budaya serta kondisi geografis. Namun demikian adanya perbedaan sumber daya dan faktor-faktor lain bukanlah menjadi hambatan untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah pengawasan dan evaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana

penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

Chusnah, Saidatul. 2014. *Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur).* Jurnal Ilmiah FEB UB.

Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi, Edisi17*. Alih bahasa oleh Nur Rosyidah, Anna Elly, dan Bosco Carvallo. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.

BPS.2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali 2015.* BPS Bali

BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2011-2015.* BPS Bali.

Muttaqin F. (2016). *Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S1 FE UII.